

PELAKSANAAN DISEMINASI RESTRUKTURISASI USAHA BAGI KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH OLEH DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI JAWA TIMUR

Devy Ayu Rahmadani¹, Indah Murti², Dida Rahmadanik³

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: devyayu31@gmail.com

Abstrak

Koperasi dan UKM memiliki peran penting dalam membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Tetapi masih banyak yang mengalami permasalahan dalam mengelola usahanya yang menyebabkan kemacetan usaha dan mengalami gulung tikar karena tidak dapat mengembangkan usahanya. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur melalui Program Penguatan Produksi dan Restrukturisasi Usaha melaksanakan kegiatan Diseminasi Restrukturisasi Usaha. Dalam pelaksanaannya masih mengalami masalah seperti peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi, jumlah peserta melebihi kapasitas yang diundang, peserta pulang belum pada waktunya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pelaksanaan dan faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan Diseminasi Restrukturisasi Usaha bagi koperasi dan usaha kecil menengah. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dan kesimpulan penelitian ini adalah (1) Pelaksanaan sudah dilaksanakan dengan baik dan terstruktur (2) Faktor pendukung dalam pelaksanaan yaitu Komunikasi dan Struktur Organisasi, Faktor penghambat yaitu Sumber Daya dan Disposisi.

Kata Kunci: *Pelaksanaan, Implementasi Kebijakan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah*

Abstract

Cooperatives and SMEs have an important role in helping increase national economic growth. But there are still many who experience problems in managing their businesses which cause business congestion and go out of business because they can't develop their businesses. To support economic growth, the Department of Cooperatives and SMEs of East Java Province through the Program for Strengthening Production and Business Restructuring carried out the Dissemination of Business Restructuring activities. In its implementation, there are still problems such as participants not meeting administrative requirements, the number of participants exceeding the invited capacity, participants returning not on time. The purpose of this study was to determine the implementation strategy and the supporting and inhibiting factors for the implementation of the Dissemination of Business Restructuring for cooperatives and small and medium enterprises. This research method uses descriptive qualitative method. The results and conclusions of this study are (1) The implementation has been carried out well and structured (2) Supporting factors in implementation are Communication and Organizational Structure, inhibiting factors are Resources and Disposition.

Keywords: *Implementation, Policy Implementation, Cooperative, Small And Medium Enterprises*

PENDAHULUAN (INTRODUCTION)

Kesenjangan yang terjadi pada perekonomian masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Pada September 2020, presentase angka penduduk miskin di Indonesia terjadi peningkatan menjadi 10,19% yang artinya ada sebanyak 27,55 juta orang yang mengalami kemiskinan (bps.go.id,2021). Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perekonomian nasional yaitu melakukan penguatan terhadap kinerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (K-UKM). Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memiliki peran sangat penting dalam membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Karena koperasi dan usaha kecil menengah merupakan kegiatan yang berpeluang menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan mensejahterakan seluruh anggotanya, hal tersebut dibuktikan dengan telah berkontribusinya K-UMKM terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Jawa Timur sebesar 57,25%, pada tahun 2020 (sumber: www.diskopukm.jatimprov.go.id).

Jumlah total Koperasi di Jawa Timur hingga Januari 2021 mencapai 35.583, yang terbagi dari Koperasi aktif dan Koperasi tidak aktif, jumlah Koperasi aktif di Jawa Timur sebesar 22.450 dan jumlah Koperasi tidak aktif di Jawa Timur sebesar 13.133 dengan jumlah anggota Koperasi mencapai 3.879 juta orang. Jumlah total UMKM di Jawa Timur mencapai 9.782.262, dengan pembagian yaitu jumlah Usaha Mikro sebesar 9.133.859, jumlah Usaha Kecil sebesar 579.567, dan jumlah Usaha Menengah sebesar 68.835 (www.diskopukm.jatimprov.go.id, diakses pada 18 Maret 2021). Banyak Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (K-UKM) masih mengalami permasalahan dalam mengelola usahanya yang menyebabkan kemacetan pada usaha dan tidak sedikit usaha yang

hingga mengalami gulung tikar karena tidak dapat mengembangkan usahanya. Permasalahan yang sering terjadi yang menyebabkan kemacetan usaha pada Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (K-UKM) antara lain seperti permasalahan pada permodalan usaha, pendapatan usaha yang berkurang, sumber daya manusia yang kurang kompeten, pengelolaan manajemen yang kurang baik, hingga permasalahan pada pemasaran produk (berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur).

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur melalui Program Penguatan Produksi dan Restrukturisasi Usaha berupaya melaksanakan kegiatan Diseminasi Restrukturisasi Usaha. Dalam pelaksanaannya masih mengalami masalah seperti peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi, jumlah peserta melebihi kapasitas yang diundang, peserta pulang belum pada waktunya. Padahal dalam undangan yang ditunjukkan untuk peserta, disana sudah dicantumkan daftar persyaratan yang harus dibawa dan dilengkapi oleh peserta guna sebagai laporan pertanggungjawaban. Dengan adanya permasalahan tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan Diseminasi Restrukturisasi Usaha bagi K-UKM oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur (2) Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Diseminasi Restrukturisasi Usaha.

METODE PENELITIAN (RESEARCH METHOD)

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Creswell (2019:4-5) merupakan metode-metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari suatu masalah sosial atau kemanusiaan.

Dengan menggunakan metode deskriptif untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah, dengan terlebih dahulu melakukan pengumpulan data dan melakukan wawancara di lokasi penelitian kemudian hasil data yang telah diperoleh tersebut diolah dan diartikan untuk dapat dianalisa dan diinterpretasikan sebagai jawaban atas penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Fokus Penelitian adalah (1) Strategi pelaksanaan Diseminasi Restrukturisasi Usaha bagi K-UKM yang di gunakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kualitas K-UKM, (2) Menentukan faktor pendukung dan faktor penghambat dari pelaksanaan Diseminasi Restrukturisasi Usaha bagi K-UKM. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, menurut Creswell (2020:254-255) yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan data sekunder untuk mendukung penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN (RESULT AND DISCUSSION)

Pelaksanaan Diseminasi Restrukturisasi Usaha bagi K-UKM.

maka dapat diketahui pelaksanaan Diseminasi Restrukturisasi Usaha bagi K-UKM oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, dengan adanya indikator implementasi kebijakan menurut George Edward III (1980,1):

1. Komunikasi

Menurut George Edward III (1980,1) dalam Riant Nugroho (2018:747), Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada organisasi maupun publik dan bagaimana sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat. Tujuan, sasaran dan informasi yang mengenai kebijakan harus di sampaikan dengan baik dan benar sehingga dapat mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Pada indikator komunikasi dapat dikelompokkan meliputi pengertian,

tujuan pelaksanaan, dan kapan Diseminasi Restrukturisasi Usaha bagi K-UKM di laksanakan.

Berdasarkan hasil analisis, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur menetapkan Program Penguatan Produksi Dan Restrukturisasi Usaha untuk meningkatkan kualitas K-UKM melalui kegiatan Diseminasi Restrukturisasi Usaha bagi K-UKM. Seperti halnya dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Dwi Sepriyono Nur (2017), bahwa Dinas Koperasi dan UKM di Kota Samarinda juga menetapkan kegiatan temu UKM dan pembinaan untuk meningkatkan jumlah UMKM di Kota Samarinda. Kegiatan Diseminasi Restrukturisasi Usaha bagi K-UKM adalah sebuah kegiatan penyampaian informasi yang membahas tentang perbaikan usaha bagi koperasi dan UKM yang sedang atau akan mengalami permasalahan pada usahanya. Informasi yang di sampaikan dalam kegiatan Diseminasi Restrukturisasi Usaha bagi K-UKM menyesuaikan dengan jenis usaha peserta yang akan di undang yaitu koperasi atau UKM. Sehingga dalam penyampaian informasi yang akan di berikan nantinya menjadi tepat sasaran dan dapat mencapai tujuan. Tujuan dari Kegiatan Diseminasi Restrukturisasi Usaha bagi K-UKM yaitu untuk menambah pengetahuan serta membuka wawasan para pelaku K-UKM agar mampu bertahan untuk mengelola kembali usahanya yang mengalami kemacetan usaha sehingga dapat melewati, dapat berkembang dan menjadi berkualitas.

Kegiatan Diseminasi Restrukturisasi Usaha bagi K-UKM ini di laksanakan sudah sejak tahun 2017, diadakan hingga 15-18 kegiatan per tahunnya sesuai dengan anggaran yang diterima. Pelaksanaan program mengikuti dengan bulan pada perencanaan anggaran yaitu Triwulan I Januari-Maret, Triwulan II April-Juni, Triwulan III Juli-September, Triwulan IV Oktober- Desember. Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Restrukturisasi Usaha bagi K-

UKM dilaksanakan pada Triwulan I di bulan ke 3 yaitu pada bulan Maret. Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Restrukturisasi Usaha bagi K-UKM dilaksanakan di Kota atau Kabupaten yang mendukung dari segi lokasi pelaksanaan.

2. Sumber Daya

Sumber daya menurut George Edward III dalam Subarsono (2020:90-92), merupakan faktor penting yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan agar efektif, Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia, yakni kompetensi yang dimiliki oleh implementor dan sumber daya finansial untuk mengimplementasikan kebijakan. Pada indikator sumber daya dikelompokkan meliputi, sumber daya tim pelaksana kegiatan, fasilitas yang diberikan, dan anggaran untuk melaksanakan kegiatan Diseminasi Restrukturisasi Usaha bagi K-UKM.

Dalam kegiatan Diseminasi Restrukturisasi bagi K-UKM sumber daya meliputi pembagian tugas tim, panitia dalam pelaksanaan Diseminasi Restrukturisasi Usaha bagi K-UKM terdiri dari 1 (satu) tim dalam 1 (satu) seksi yang terbagi menjadi kepala seksi sebagai ketua pelaksana, tim baca doa, tim MC, tim dirigen indonesia raya, dan tim absensi. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Wilda Karunia dan Roro Merry Chornelia Wulandary (2019), bahwa implementasi pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu dilihat dari peran pemerintah dalam menepatkan orang yang ahli dibidangnya masing-masing. Sehingga Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur sudah menetapkan kepanitian untuk melaksanakan kegiatan Diseminasi Restrukturisasi Usaha bagi K-UKM yang sudah diatur dalam SK (Surat Keputusan) Kepanitian oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.

Kemudian fasilitas yang didapatkan peserta dalam pelaksanaan kegiatan Diseminasi Restrukturisasi Usaha bagi K-

UKM yaitu , Seminar Kit (*Goody bag* dan ATK), makan dan minum selama kegiatan berlangsung, serta peserta mendapatkan bantuan uang transport sebesar Rp. 100.000 , Jika pandemi seperti sekarang ini ditambah dengan *face shield*, masker, dan *hand sinitizer*. Penetapan anggaran kegiatan Diseminasi Restrukturisasi Usaha bagi K-UKM oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur sudah dinyatakan secara rinci dan jelas, seperti penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dwi Sepriyono Nur (2017) bahwa faktor pendukung dari kegiatan dalam rangka meningkatkan jumlah UMKM Kota Samarinda adalah fasilitas pembiayaan yang mendukung. Sedangkan menurut hasil penelitian Euis Hasmita Putri (2017) bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Samarinda adalah mininya dana untuk mengadakan kegiatan. Sehingga berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan, bahwa dalam pelaksanaan Diseminasi Restrukturisasi Usaha bagi K-UKM penetapan anggaran juga berperan untuk mengendalikan dan menjalan program.

Sumber daya finansial yang dimaksud oleh George Edward III (1980,1), dalam kegiatan Diseminasi Restrukturisasi Usaha bagi K-UKM, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur sudah mengusulkan anggaran kegiatan pada saat penyusunan APBD. Setelah Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur menerima plafon anggaran yang telah ditentukan, kemudian anggaran tersebut dibagi menurut jumlah bidang dan seksi dalam satu instansi. Jika sudah dibagi menurut jumlah seksi, maka anggaran tersebut baru dapat bisa digunakan untuk merencanakan kegiatan selama satu tahun dengan mempertimbangkan jumlah anggaran yang diimiliki. Anggaran belanja kegiatan Diseminasi Restrukturisasi Usaha bagi K-UKM yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, antara lain :

1. Belanja Akomodasi Dan Konsumsi
2. Belanja Jasa / Narasumber
3. Belanja Perjalanan Dinas Daerah
4. Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Jasa Dokumentasi Dan Publikasi
5. Belanja Cetak Atau Pengadaan

Semua dasar dari penyusunan anggaran belanja kegiatan Diseminasi Restrukturisasi Usaha bagi K-UKM adalah dengan melihat buku Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan setiap tahun. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021. Di dalam buku tersebut sudah mengatur tentang tarif dan biaya tentang panduan perjalanan dinas sehingga acuan penentuan harga semua sudah tercantum pada buku.

3. Disposisi

Menurut George Edward III dalam Subarsono (2020:90-92), Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan (implementator) seperti kecakapan, komitmen, sifat demokratis serta kejujuran untuk melaksanakan kebijakan agar seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Pada indikator disposisi yang dimaksud adalah bagaimana cara Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dalam menentukan peserta dan pemateri dalam pelaksanaan kegiatan Diseminasi Restrukturisasi Usaha bagi K-UKM agar dapat mewujudkan komitmen dalam mencapai tujuan yaitu meningkatkan kualitas K-UKM.

Untuk menentukan peserta dan pemateri dalam pelaksanaan Diseminasi Restrukturisasi Usaha bagi K-UKM, Dinas Koperasi melakukan pemetaan peserta agar terjadinya pemerataan. Pemetaan dilakukan agar para pelaku K-UKM dari berbagai wilayah di seluruh Jawa Timur dapat mengikuti kegiatan Diseminasi Restrukturisasi Usaha bagi K-UKM karena peserta yang di undang pada kegiatan

Diseminasi Restrukturisasi Usaha bagi K-UKM merupakan peserta yang berasal dari sekitar wilayah dari lokasi pelaksanaan. Kemudian untuk menentukan pemateri dalam pelaksanaan Diseminasi Restrukturisasi Usaha bagi K-UKM, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur terlebih dahulu menentukan sasaran dalam kegiatan yaitu apakah Koperasi atau UKM. Jika sasaran dari kegiatan Diseminasi adalah koperasi maka pemateri yang akan di undang merupakan pemateri yang ahli dibidangnya dan materi yang akan disampaikan juga tentang masalah yang terjadi pada koperasi seperti kelembagaan koperasi, sumber daya koperasi. Jika sasaran dari kegiatan Diseminasi adalah UKM maka pemateri yang diundang merupakan pemateri yang ahli dibidangnya dan materi yang akan disampaikan tentang permasalahan yang ada di UKM seperti standarisasi, produk halal, manajemen. Sehingga sasaran menjadi tepat dan pelaksanaan kegiatan Diseminasi Restrukturisasi Usaha bagi K-UKM dapat mencapai tujuan yaitu meningkatkan kualitas K-UKM.

4. Struktur Organisasi

Menurut George Edward III dalam Subarsono (2020:90-92), Struktur organisasi mempunyai tugas yang berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. salah satu aspek yang penting dari setiap organisasi adalah SOP (*Standard Operating Procedures*) yang menjadi pedoman bagi pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan. prosedur merupakan langkah-langkah atau teknik-teknik yang berurutan dan terstruktur yang menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan harus diselesaikan. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur menetapkan prosedur dalam menyelesaikan kegiatan Diseminasi Restrukturisasi Usaha bagi K-UKM. Penetapan prosedur tersebut bertujuan agar suatu pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan yang diinginkan.

Untuk mengikuti Diseminasi Restrukturisasi Usaha bagi K-UKM, persyaratan yang harus di lengkapi dan dibawa oleh peserta adalah :

1. Surat Perintah Tugas (SPT) dari Dinas/Lembaga masing-masing (3 lembar)
2. Fotocopy KTP (3 lembar)
3. Mengisi biodata peserta dengan lengkap
4. Mengisi intip.in/FORMBINAANDISKOPJATI2021

Langkah-langkah dalam pelaksanaan tugas dalam kegiatan Diseminasi Restrukturisasi Usaha bagi K-UKM, sebagai berikut :

1. Memetakan peserta yang akan dihadirkan
2. Menentukan materi yang akan di sampaikan kepada peserta
3. Menentukan tempat pelaksanaan
4. Membuat surat undangan untuk peserta dan narasumber
5. Menyiapkan administrasi kwitansi transport peserta dan narasumber
6. Menyiapkan naskah sambutan : MC, doa, dan sambutan ketua pelaksana
7. Menyiapkan seminar kit
8. Menyiapkan materi peserta menggunakan link
9. Menyiapkan bantuan uang tranport peserta
10. Menyiapkan peralatan (laptop, LCD, printer, kamera)
11. Dan menyiapkan perlengkapan lainnya hingga hari H pelaksanaan

Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung dalam Pelaksanaan Diseminasi Restrukturisasi Usaha bagi K-UKM

Menganalisis pelaksanaan Diseminasi Restrukturisasi Usaha bagi K-UKM dengan indikator implementasi kebijakan menurut George Edward III (1980,1) :

a. Komunikasi

Menurut George Edward III (1980,1) dalam Riant Nugroho (2018:747),

Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada organisasi maupun publik dan bagaimana sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat. Komunikasi adalah salah satu faktor penentu yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan dari suatu kebijakan dalam mencapai tujuan dari pelaksanaan. Suatu pekerjaan akan berjalan apabila adanya komunikasi yang baik, sehingga semua harus dikomunikasikan secara tepat. Tujuan, sasaran dan informasi yang mengenai kebijakan harus di sampaikan dengan baik dan benar sehingga dapat mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aina Florita, Jumiaty, dan Adil Mubarak (2018) bahwa program pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang belum berjalan maksimal dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan dan kurangnya tenaga profesional.

Komunikasi yang dimaksud dalam pelaksanaan Diseminasi Restrukturisasi Usaha bagi K-UKM adalah bagaimana cara Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur mensosialisasikan program agar pihak pihak yang terlibat memahami dan mengerti tentang tujuan dari pelaksanaan Diseminasi Restrukturisasi bagi K-UKM. Sosialisasi yang di lakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur dalam mensosialisasikan kegiatan Diseminasi Restrukturisasi Usaha dengan penyampaian informasi sosialisasi melalui koordinator komunitas atau asosiasi perkumpulan baik itu koperasi maupun UKM, yang selanjutnya pihak asosiasi maupun komunitas koperasi serta UKM meneruskan informasi tersebut kepada anggotanya. Pemahaman pegawai mengenai tujuan dari pelaksanaan Diseminasi Restrukturisasi Usaha. Tingkat pemahaman pegawai sudah memahami dengan baik, pegawai sudah memahami tujuan dari pelaksanaan Diseminasi

Restrukturisasi Usaha bagi K-UKM adalah untuk meningkatkan pengetahuan baik itu koperasi maupun UKM agar dapat bertahan untuk mengelola kembali usahanya yang mengalami kemacetan usaha agar dapat berkembang dan menjadi berkualitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang terjalin antar pegawai sudah berjalan dengan baik.

b. Sumber Daya

Sumber daya menurut George Edward III dalam Subarsono (2020:90-92), merupakan faktor penting yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan agar efektif, Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia, yakni kompetensi yang dimiliki oleh implementor dan sumber daya finansial untuk mengimplementasikan kebijakan. Sumber daya juga merupakan salah satu faktor penting dalam pengimplementasian sebuah kebijakan.. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dwi Sepriano Nur (2017), bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda adalah minimnya sumber daya tenaga. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Hariyoko (2018), bahwa dalam pengembangan UMKM di Kota Tuban masih terkendala karena masih ada beberapa pihak yang peran dan usahanya kurang optimal. Maka disimpulkan bahwa Sumber daya juga mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan, karena jika sumber daya baik maka pelaksanaan kebijakan juga baik

Sumber daya dalam pelaksanaan Diseminasi Restrukturisasi Usaha bagi K-UKM yaitu dengan melihat kinerja pegawai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur yang terlibat dalam pelaksanaan. Dalam pemanfaatan sumber daya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur sudah menetapkan pembagian tugas antar pegawai dalam pelaksanaan Diseminasi Restrukturisasi Usaha bagi K-UKM. Pembagian tugas tersebut meliputi ketua pelaksana, tim MC, tim doa, tim dirigen

indonesia raya, dan tim absensi. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa, semua para pegawai sudah memiliki jobdesk masing-masing dan sudah cukup berkompeten sehingga semua tugas yang ada sudah dibagi sama rata antar pegawai agar dapat terselesaikan dengan baik. Namun, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepala seksi masih harus selalu mengawasi kinerja pegawai jika nanti dalam penyelesaiannya ada pekerjaan yang kurang tepat akan diberikan arahan agar sesuai.

c. Disposisi

Menurut George Edward III dalam Subarsono (2020:90-92), Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan (implementator) seperti kecakapan, komitmen, sifat demokratis serta kejujuran untuk melaksanakan kebijakan agar seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Disposisi merupakan faktor ketiga dalam pelaksanaan kebijakan yang juga mempengaruhi keberhasilan dari sebuah kebijakan. Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Apabila pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik maka akan bisa menjalankan kebijakan dengan baik sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam disposisi, sikap dan komitmen pegawai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur yang menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan. Komitmen yang baik juga akan memiliki pengaruh yang baik dalam pelaksanaan, begitu sebaliknya jika komitmen tidak baik akan memperlambat pelaksanaan kebijakan.

Respon dan komitmen pegawai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan Diseminasi Restrukturisasi Usaha bagi K-UKM sudah baik, karena pegawai sudah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP yang ada. Meskipun masih ada pegawai yang kerjanya sedikit lambat sehingga dapat menghambat dalam penyelesaian pekerjaan,

permasalahan ini masih bisa diselesaikan dengan memberikan motivasi, arahan, dan pemahaman kepada pegawai yang berkinerja lambat agar dapat meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik. Untuk respon dan komitmen peserta Diseminasi Restrukturisasi Usaha masih kurang, karena berdasarkan hasil wawancara mengenai kendala yang sering dihadapi petugas dalam pelaksanaan adalah adanya respon peserta yang kurang karena seringkali peserta tidak melengkapi persyaratan administratif untuk mengikuti kegiatan padahal persyaratan tersebut sudah dicantumkan pada surat undangan peserta.

d. Struktur Organisasi

Menurut George Edward III dalam Subarsono (2020:90-92), Struktur organisasi mempunyai tugas yang berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. salah satu aspek yang penting dari setiap organisasi adalah SOP (*Standard Operating Procedures*) yang menjadi pedoman bagi pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan. Struktur organisasi yang panjang dan rumit akan menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Struktur organisasi berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan karena kemungkinan kebijakan tidak dapat terlaksana dengan baik disebabkan oleh adanya kelemahan dalam struktur birokrasi. Salah satu aspek penting dari organisasi adalah SOP (*Standard Operating Procedure*) yang menjadi pedoman dalam bertindak untuk mengimplementasikan kebijakan. berdasarkan hasil wawancara, untuk pelaksanaan SOP sudah dilakukan dengan baik.

Proses mekanisme dalam pelaksanaan Diseminasi Restrukturisasi Usaha bagi K-UKM yaitu dimulai dengan pembuatan surat undangan yang sudah di tanda tangani oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, kemudian surat undangan tersebut diberikan kepada asosiasi atau komunitas dari koperasi maupun UKM yang kemudian akan diteruskan kepada

anggota asosiasi maupun komunitas tersebut, jika semua sudah dilakukan mekanisme selanjutnya yaitu mempersiapkan semua kebutuhan yang diperlukan untuk pelaksanaan. Semua mekanisme pelaksanaan di lakukan oleh pegawai seksi restrukturisasi usaha yang terdiri dari 2 (dua) pegawai PNS dan 3 (tiga) PTTPK yaitu Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja, jumlah pegawai tersebut masih bisa di optimalkan untuk melaksanakan tugas. Yang artinya berdasarkan struktur organisasi yang dimaksud oleh George Edward III dalam Subarsono (2020:90-92), sehingga dalam pelaksanaan Diseminasi Restrukturisasi Usaha bagi K-UKM sudah dilaksanakan secara baik dengan jumlah pegawai yang minim.

KESIMPULAN (CONCLUSION)

Berdasarkan data dan informasi yang peneliti peroleh dari penelitian dengan membandingkan teori dan kondisi yang sebenarnya, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan strategi Diseminasi Restrukturisasi Usaha bagi Koperasi dan UKM oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas K-UKM sudah dilaksanakan dengan baik. Mulai dari penetapan program, penetapan anggaran, dan penetapan prosedur semua sudah terstruktur secara jelas dan rinci, sehingga dalam pelaksanaannya akan lebih terkoordinasi dan pelaksanaan terlaksana dengan baik.

Dengan melihat apa yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan Diseminasi Restrukturisasi Usaha bagi K-UKM oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Dapat disimpulkan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Diseminasi Restrukturisasi Usaha bagi K-UKM. Faktor pendukung dalam pelaksanaan implementasi program ini adalah (1) Komunikasi dan (2) Struktur

Organisasi, sedangkan untuk faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi program adalah (1) Sumber daya dan (2) Disposisi.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Bungin, M. B. (2011). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Edisi kedua. Jakarta: Prenada Media Group.
- Chaniago, A. (1987). *Perkoperasian Indonesia*. Bandung: Angkasa.
- Creswell, J. W. (2019). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi keempat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Eka, W. K., & Wukandary, R. M. C. (2019). *Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan)*. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 8(2), 100–108.
- Florita, A., Jumiaty, & Mubarak, A. (2018). *Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Oleh Dinas Koperasi Dan Ukm Kota Padang*. JMIAP : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 1(1), 143–153.
- Hariyoko, Yusuf. (2018). *Pengembangan UMKM di Kota Tuban*. JPAP : Jurnal Penelitian Administrasi Publik. 4(1).
- Nugroho, Riant. (2017). *Public Policy*. Edisi ke-6. Jakarta: Gramedia
- Putri E, H. (2017). *Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Samarinda (Studi Pada Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Samarinda)*. E-Journal Administrasi Negara, 5(1), 5431–5445.
- Ridwan, M., Hartutiningsih, & Hatuwe, M. (2014). *Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang*. Jurnal Administrative Reform, 2, 187–199.
- Sepriyono, D. (2019). *Peran Dinas Koperasi Dan Ukm Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kota Samarinda*. Handbook of Pediatric Retinal OCT and the Eye-Brain Connection, 5, 285–287.
- Subarsono, (2020). *Analisis Kebijakan Publik*

- Konsep Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sulistia, D. F., & Suparman, N. (2019). *Peranan Pembinaan Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Jawa Barat Dalam Memajukan Perkoperasian Di Daerah*. Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 7(2), 58.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.